



Jangan Sampai Sisakan Persoalan

YOGYA, TRIBUN - Menjelang proses pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta terpilih, Haryadi Suyuti-Heroe Poerwadi, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan menagih janji Inspektorat Kota Yogyakarta menindak tegas aparat sipil negara (ASN) yang dinyatakan tidak netral selama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) lalu. Pelapor ASN tak netral itu berharap agar langkah hukum tetap berlanjut dan tidak menyisakan permasalahan.

"Hingga saat ini Inspektorat belum memberikan hasil keputusannya pada pelapor. Saya menilai kinerja Inspektorat lambat dan bisa dika-

takan gagal, karena ada ASN tak netral belum segera diproses," ujar Andi Kartala, selaku pelapor, Jumat (5/5).

Dia mengatakan, tindakan yang dilakukan salah satu ASN, yakni pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta dalam Pilkada Kota Yogyakarta beberapa waktu lalu, terbukti nyata melakukan kampanye.

Hal tersebut, kata dia, tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang ASN.

**Jangan sampai
nanti pada waktu
pelantikan wali
kota dan wakil
wali kota, masih
menyisakan per-
masalahan**

• ke halaman 14 Andi Kartala

Jangan Sampai Sisakan Persoalan

• Sambungan Hal 13

Menurut Andi, yang juga advokasi Badan Pemenangan Pemilu DPC PDI Perjuangan, dalam UU ASN sudah jelas dan tegas sanksi untuk ASN yang tidak netral. Bahkan, sanksi juga dimuat dalam peraturan pemerintah (PP) nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS.

"Jangan sampai nanti pada waktu pelantikan wali kota dan wakil wali kota, masih menyisakan permasalahan terkait sengketa Pilkada kota Yogyakarta. Ketidakeadilan harus ditegakkan meski Pilkada sudah usai," tegasnya.

Dia mendorong, pengawasan pada kasus ASN tak

netral tersebut juga harus dikawal, dan pemeriksaan pada oknum ASN tersebut bisa ditegakkan melalui jalur hukum. Jika berhenti, kata dia, maka ada pengaburan pada fakta ketidaknetralan ASN.

Antonius Fokki Ardiyanto, Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Yogyakarta, menambahkan, meskipun proses Pilkada telah usai dan menunggu pelantikan, dia meminta agar persoalan ini tidak mengganggu jalannya pelantikan. Selain itu, bisa mengganggu hubungan eksekutif dan legislatif ke depannya.

"Saya meminta Penjabat Wali Kota Yogyakarta tidak gagal paham menangani persoalan ini. Meski pemilihan Pilwali Yogyakarta 2017 telah usai," jelasnya. Dia juga mengingatkan,

partainya PDIP adalah partai politik pemenang Pileg 2014 dan menempatkan wakilnya sebagai Ketua DPRD Kota Yogyakarta. Sehingga, memiliki peran strategis dalam pengambilan kebijakan pemerintahan kota mendatang, utamanya dalam pembahasan APBD Perubahan 2017 atau APBD 2018.

Rahasia
Saat dikonfirmasi secara terpisah, Kepala Inspektorat Yogyakarta Wahyu Widayat menjelaskan, pihaknya tidak bisa berkomentar banyak terkait dengan pemeriksaan ASN ini. Pihaknya menyampaikan pemeriksaan dan hasilnya tersebut bersifat rahasia dan tidak bisa dipublikasikan.

"Hanya pelapor saja yang bisa mengetahui. Ini rahasia karena menyangkut pribadi seseorang," jelasnya.

Sebelumnya, saat menerima aksi demo Forum Pengawal Demokrasi Indonesia di Balai Kota Yogyakarta, Wahyu menegaskan proses kajian atas rekomendasi panwas dan pemeriksaan terhadap saksi maupun terlapor diperkirakan membutuhkan waktu setidaknya dua pekan.

Sementara, Penjabat Wali Kota Yogyakarta, Sulistyono mengatakan, sudah ada kesimpulan terkait sanksi apa yang diberikan oleh Pemkot setempat. Sementara, proses pemeriksaan pun berjalan sesuai aturan yang berlaku. Dia menyebut sudah ada kesimpulan sanksi apa yang akan dijatuhkan.

"Sudah diproses semua," kata Sulistyono sembari menyebut hasil bisa dikonfirmasi ke Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP). (ais)

Plt. Kepala

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Inspektorat	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005